

Upaya Guru Dalam Meningkatkan Pengetahuan Kewargaan Siswa Melalui Model Pembelajaran *Controversial Issues*

Frida Intan Permatasari^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo, Indonesia

¹ fridappkn@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 Mei 2023;

Revised: 12 Mei 2023;

Accepted: 28 Mei 2023.

Kata-kata kunci:

Pengetahuan Kewargaan;

Model Pembelajaran;

Controversial Issues;

Pendidikan

Kewarganegaraan.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya guru untuk meningkatkan civic knowledge siswa melalui model pembelajaran controversial issues. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan sedangkan bentuk penelitiannya Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo yang berjumlah 38 orang siswa yang terdiri dari 28 orang siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan beserta 1 orang guru PKn. Pemilihan kelas yang dikenai tindakan berdasarkan hasil prariset yang dilakukan peneliti dan rekomendasi guru bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Terdapat peningkatan civic knowledge siswa melalui penerapan model pembelajaran controversial issues pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo, bisa dilihat perolehan tes hasil belajar siswa dimulai dari pra siklus mendapat ketuntasan klasikal 37,8% dengan nilai rata-rata 69, dilanjutkan dengan siklus I mengalami peningkatan dengan ketuntasan klasikal 56,75% dengan nilai rata-rata 71,35. Siklus II mengalami peningkatan dengan ketuntasan klasikal 77,14% dengan nilai rata-rata 80.

ABSTRACT

Teacher's Efforts in Improving Students' Citizenship Knowledge Through the Controversial Issues Learning Model. The purpose of this study was to find out the teacher's efforts to increase students' citizenship knowledge through a learning model on controversial issues. The method used in this research is action research while the research form is Classroom Action Research (CAR). The subjects in this study were class VIII students of Middle School 1 Balongbendo, totaling 38 students consisting of 28 male students and 10 female students along with 1 Civics teacher. The selection of classes subject to action was based on the results of pre-research conducted by researchers and recommendations from teachers in the field of Citizenship Education. There is an increase in students' civic knowledge through the application of the controversial issues learning model in the Citizenship Education subject in class VIII Middle School 1 Balongbendo. It can be seen that the acquisition of student learning outcomes tests starts from the pre-cycle to obtain classical completeness of 37.8% with an average score of 69, followed by cycle I which experienced an increase with classical completeness of 56.75% with an average value of 71.35. Cycle II experienced an increase with classical completeness of 77.14% with an average value of 80.

Copyright © 2023 (Frida Intan Permatasari). All Right Reserved

How to Cite: Permatasari, F. I. (2023). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Pengetahuan Kewargaan Siswa Melalui Model Pembelajaran Controversial Issues. *Lucerna : Jurnal Riset Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(1), 1–7. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/lucerna/article/view/1158>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pendidikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, 2003). Pendidikan juga dapat diartikan segala proses perubahan sikap dan perilaku individu atau kelompok individu melalui pengayaan pengetahuan dan penguatan kesadaran. (Gatara & Sofhian, 2012: 6). Adapun UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, fungsi Pendidikan Nasional yaitu : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatahat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional, salah satu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sesuai perkembangan terakhir kurikulum sekolah di Indonesia yang lebih dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran dimunculkan dengan nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan singkat PKn (Permendiknas No. 22 Tahun 2006). Pendidikan Kewarganegaraan diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Cogan (Winarno, 2013: 4) mengartikan civic education sebagai “the foudational course work in school the signed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives”. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Menurut Winarno (2013: 95), tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakterkarakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.

Untuk mencapai tujuan PKn sebagaimana yang dimaksud di atas, maka harus adanya kegiatan pembelajaran yang dapat mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Rombepajung (Thobroni & Mustofa, 2011: 18), mengemukakan bahwa pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata pelajaran atau pemerolehan suatu keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, dan pengajaran. Dalam proses pembelajaran PKn, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi seperti faktor guru, siswa, iklim belajar, materi pelajaran yang diberikan, media dan lain-lain. Faktorfaktor tersebut perlu mendapat perhatian agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, sehingga akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. Dalam upaya pencapaian kompetensi dan meningkatkan hasil belajar serta mutu pendidikan, seorang guru khususnya guru PKn diharapkan memiliki pengetahuan yang luas dan mampu merancang pembelajaran serta mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Suprihatiningrum (2014: 24) mengemukakan bahwa: “guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran, serta mampu menata dan mengelola kelas agar siswa dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan”.

Dalam proses pembelajaran, hasil belajar merupakan suatu hal yang diperoleh atau dicapai siswa selama kegiatan pembelajaran di sekolah. Adapun hasil belajar dalam penelitian ini adalah kemampuan kognitif siswa, kemampuan kognitif siswa yang akan diteliti yaitu civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), dimana siswa dapat mengetahui dan memahami serta mengaplikasikan materi pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan setelah pelaksanaan proses pembelajaran. Budimansyah (2010: 29) mengemukakan bahwa: “Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara”. Civic knowledge berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara. Sejalan dengan pendapat di atas Wahidmurni, dkk. (2010: 18) menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya dari segi kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya terhadap suatu objek. Dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar (*civic knowledge*) dari segi kognitif dapat diukur melalui tes yang diberikan guru.

Dari hasil pra observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa saat proses pembelajaran PKn hasil yang diperoleh belum maksimal. Ulangan umum semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 ketuntasan kurang lebih 37,8 % dari seluruh jumlah siswa di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo. Dengan rata-rata nilai 69, padahal kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang telah ditetapkan sekolah adalah 74. Pada saat proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berlangsung masih banyak siswa yang belum memahami mengenai materi ketaatan terhadap perundang-undangan nasional yang di sampaikan, sehingga nilai siswa yang belum dapat memenuhi ketuntasan belajar yaitu belum mampu menyelesaikan, menguasai kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaran pada saat dilakukan evaluasi. Adapun faktor yang menjadi penyebabnya yaitu pada saat proses pembelajaran siswa hadir di kelas dengan persiapan belajar yang tidak memadai seperti siswa tidak memiliki buku paket dan hanya menggunakan lembar kerja siswa (LKS). Model pembelajaran yang di gunakan dominan menggunakan model konvensional yaitu metode ceramah dan tanya jawab, sehingga timbul kebosanan bagi siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Kegiatan belajar siswa terbatas pada mendengarkan, mencatat, dan menghafal. Partisipasi Siswa dalam kegiatan pembelajaran, seperti bertanya, menanggapi, maupun guru melakukan sesi tanya jawab, para siswa kurang memberikan respon yang baik, hanya ada satu sampai dua orang saja yang aktif menjawab pertanyaan guru.

Selain melakukan observasi terhadap proses pembelajaran di kelas VIII, peneliti juga melakukan wawancara kepada guru PKn. Hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa respon dan sikap siswa selama kegiatan berlangsung masih pasif, hanya ada beberapa siswa saja yang aktif, kebanyakan mereka masih malu untuk mengeluarkan pendapat dan siswa sulit memahami materi ketaatan terhadap perundang-undangan nasional yang telah disampaikan walaupun guru sudah semaksimal mungkin dalam menyampaikan materi tersebut. Dengan permasalahan yang ada, penting bagi guru PKn untuk memahami bagaimana menentukan dan mendesain model pembelajaran yang mampu mengembangkan pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan (*civic knowledge*). Atau dengan kata lain bagaimana merancang pendekatan, strategi, metode, maupun teknik yang dapat mengembangkan ranah kognitif siswa.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, yaitu tentang bagaimana upaya yang di lakukan oleh guru untuk meningkatkan civic knowledge siswa pada mata pelajaran PKn, Guru dapat memilih salah satu model pembelajaran. Komalasari, (2010) mengemukakan bahwa: “Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru”. Salah satunya adalah model pembelajaran *Controversial Issues*. Muessig (Komalasari, (2010) mengemukakan bahwa: “*Controversial Issues* (isu kontroversial) adalah sesuatu yang mudah diterima oleh seseorang atau kelompok, tetapi juga mudah ditolak oleh orang atau kelompok lain”.

Controversial Issues merupakan salah satu model pembelajaran kontekstual. Penerapan model ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami isu-isu dan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan kehidupan siswa. Siswa diajak untuk mampu mengambil keputusan dengan alasan atau pertimbangan yang rasional didukung dengan fakta, konsep, dan prinsip yang akurat (Komalasari, 2010). Adapun alasan peneliti menggunakan model pembelajaran *controversial issues* agar siswa aktif, kreatif, dan berpikir secara kritis mengenai isu-isu kewarganegaraan yang diberikan oleh guru pada saat proses pembelajaran. Melalui model pembelajaran ini siswa belajar untuk mengemukakan pendapat, mendengarkan opini orang lain, mencari informasi, menyadari adanya perbedaan, membangun empati dan pengertian, untuk kemudian mengambil kesimpulan. Dengan pembelajaran isu-isu kontroversial siswa akan mengamati, memikirkan, dan bertindak menghadapi situasi tertentu, siswa lebih menyakini apa yang diamati dan menemukan banyak cara untuk mencari jalan keluar tentang isu-isu kontroversial. Pengamatan seperti di atas akan membantu siswa mengembangkan daya berpikir secara sistematis dan logis, sehingga siswa mampu mengambil keputusan yang tepat. Pembelajaran menggunakan model *controversial issues* yang dimana pembelajarannya menyajikan isu-isu kontroversial akan membantu siswa dalam mengembangkan daya intelektual dan keterampilan berkomunikasi secara lisan maupun secara tulisan. harapan peneliti melalui model pembelajaran *controversial Issues*, upaya guru dalam meningkatkan *civic knowledge* siswa dapat tercapai.

Permasalahan-permasalahan yang dipaparkan di atas memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK dipilih sebagai bentuk penelitian karena merupakan suatu penelitian yang akar permasalahannya muncul di kelas, dan dirasakan oleh guru yang bersangkutan. PTK bertujuan untuk memperbaiki atau mengatasi permasalahan yang bersangkutan dengan pembelajaran yang baik dari segi proses maupun hasilnya, dalam hal ini adalah proses meningkatkan *civic knowledge* siswa.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo pada tahun pelajaran 2020. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus, dimana masing-masing siklus terdapat empat tahapan yaitu: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) observasi; dan (4) refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik dan sumber data adalah peserta didik dan guru. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kajian dokumen, angket, dan tes. Data hasil penelitian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif mengacu pada model analisis Miles dan Huberman. Teknik analisis data secara kualitatif mengacu pada model analisis yang dilakukan dalam tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Teknik yang diperlukan untuk memeriksa validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik observasi, wawancara, kajian dokumen atau arsip, angket, dan tes prestasi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada bab satu serta deskripsi hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran *controversial issues* dapat meningkatkan *civic knowledge*. Berikut ini dibahas hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan dikontraskan dengan teori yang relevan.

Perencanaan model pembelajaran *controversial issues* pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo, sudah terlaksana

dengan baik. Hal ini ditandai dengan guru menentukan SK dan KD, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), silabus, soal evaluasi yang berupa tes uraian. Peneliti sebagai observer juga menyiapkan panduan observasi untuk mengamati proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui penerapan *controversial issues* di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo, serta menyiapkan panduan wawancara terhadap guru PKn.

Hal ini sejalan dengan pendapat Arikunto, dkk. (2014) mengemukakan bahwa hal yang dimaksud dengan perencanaan tindakan (PTK) adalah kegiatan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yaitu kegiatan yang membuat rencana akan dilaksanakan dalam pelaksanaan tindakan. Selanjutnya Arikunto (2014) mengatakan bahwa: Dalam tahap penyusunan rencana, peneliti menemukan titik-titik atau fokus peristiwa yang mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. Jika yang digunakan dalam penelitian ini bentuk terpisah, yaitu penelitian dan pelaksanaan guru adalah berbeda, dalam tahap penyusunan rencana harus ada kesepakatan antara keduanya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan model atau pendekatan pembelajaran, serta penggunaan alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam tahap perencanaan ini menekankan pada titik permasalahan yang akan dibahas, yaitu dengan membuat Silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam penyusunan RPP peneliti berkolaborasi dengan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karena penelitian ini melibatkan dua pihak yang berkerjasama (peneliti dan guru) pada saat dilakukannya penelitian.

Pelaksanaan model pembelajaran *controversial issues* pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo sudah tergolong baik. Hal ini ditandai dengan guru melaksanakan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), materi yang disajikan guru menarik perhatian siswa, langkah-langkah model pembelajaran *controversial issues* telah terlaksana dengan baik, keaktifan siswa dalam bertanya dan menjawab mulai terlatih dan siswa berani untuk mengeluarkan pendapatnya dalam menjawab isu-isu yang diberikan, serta alokasi waktu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini diungkapkan oleh Wiriaatmadja (Komalasari, 2010) mengemukakan bahwa langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan *Controversial Issues* (Isu Kontroversial) adalah sebagai berikut: (1) Guru dan siswa melakukan brainstorming mengenai isu-isu kontroversial yang akan dibahas. (2) Siswa berkelompok memilih salah satu kasus untuk dikaji (3) Siswa melakukan inkuiri, mengundang nara sumber, membaca buku, mengumpulkan informasi lain. (4) Siswa menyajikan/mendiskusikan hasil inkuiri, mengajukan argumentasi, mendengar counter-argument atau opini lainnya. (5) Siswa menerapkan konsep, generalisasi, teori ilmu sosial untuk secara akademis menganalisis permasalahan.

Selanjutnya Hasan (Komalasari, 2010) mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam pembelajaran *Controversial Issues* sebagai berikut: (1) Guru atau siswa menyodorkan suatu kasus atau isu (2) Guru mengundang berbagai pendapat siswa mengenai isu tersebut. Setiap pendapat harus dijelaskan dan diberi alasan mengapa pendapat itu dikemukakan (3) Pendapat-pendapat yang berbeda diidentifikasi sebagai isu kontroversial dan dijadikan bahan diskusi kelas. (4) Setiap siswa dapat menjadi pembela atau penyerang suatu pendapat tentang isu kontroversial disertai alasan. Hal ini memperlihatkan pula kekuatan dan kelemahan pendapat masing-masing. (5) Guru tidak perlu mengarahkan kegiatan kelas untuk mendapatkan kesepakatan-kesepakatan. (6) Guru dan siswa menarik kesimpulan mengenai kesamaan dan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, kelemahan dan keunggulan masing-masing pendapat.

Langkah-langkah di atas merupakan suatu panduan dalam menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat berjalan dengan baik sebab dalam model pembelajaran ini siswa diharapkan

untuk aktif dan bertanggung jawab baik secara individu maupun kelompok dalam proses pembelajaran mulai dari langkah yang pertama sampai langkah akhir pembelajaran, melalui model pembelajaran ini suasana belajar terasa lebih efektif, kerja sama kelompok dan dapat membangkitkan semangat siswa untuk memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat.

Pemahaman civic knowledge siswa melalui tes hasil belajar yang diperoleh mulai pada kegiatan pra siklus mendapat ketuntasan klasikal 37,8% dengan nilai rata-rata 69. Dilanjutkan dengan siklus I mengalami peningkatan dengan ketuntasan klasikal 56,75% dengan nilai rata-rata 71,35. Berhubung siklus I belum mencapai indikator yang ditentukan maka dilanjutkan dengan siklus II, yang dimana siklus II mengalami peningkatan dengan ketuntasan klasikal 77,14% dengan nilai rata-rata 80. Karena siklus II telah mencapai indikator yang telah ditentukan maka penelitian dihentikan sampai siklus II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tindakan penerapan model pembelajaran *controversial issues* pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat meningkatkan civic knowledge siswa di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan guru melalui penerapan model pembelajaran *controversial issues* dapat meningkatkan civic knowledge siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo. Perencanaan model pembelajaran *controversial issues* pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo, sudah terlaksana dengan baik. Hal ini ditandai dengan guru menentukan SK dan KD, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), silabus, soal evaluasi yang berupa tes uraian. Peneliti sebagai observer juga menyiapkan panduan observasi untuk mengamati proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui penerapan *controversial issues* di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo, serta menyiapkan panduan wawancara terhadap guru PKn. Pelaksanaan model pembelajaran *controversial issues* pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo sudah tergolong baik. Hal ini ditandai dengan guru melaksanakan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), materi yang disajikan guru menarik perhatian siswa, langkah-langkah model pembelajaran *controversial issues* telah terlaksana dengan baik, keaktifan siswa dalam bertanya dan menjawab mulai terlatih dan siswa berani untuk mengeluarkan pendapatnya dalam menjawab isu-isu yang diberikan, serta alokasi waktu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Terdapat peningkatan civic knowledge siswa melalui penerapan model pembelajaran *controversial issues* pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo, bisa dilihat perolehan tes hasil belajar siswa dimulai dari pra siklus mendapat ketuntasan klasikal 37,8% dengan nilai rata-rata 69, dilanjutkan dengan siklus I mengalami peningkatan dengan ketuntasan klasikal 56,75% dengan nilai rata-rata 71,35. Siklus II mengalami peningkatan dengan ketuntasan klasikal 77,14% dengan nilai rata-rata 80. Karena siklus II telah mencapai indikator yang telah ditentukan maka penelitian dihentikan sampai siklus II.

Referensi

- Arikunto, dkk. (2014). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi aksara.
- Budimansyah, D. (2010). *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Kewarganegaraan Multidimensional*. Bandung: Genesindo.
- Burns, A. (2010). *Doing Action Research In English Language Teaching A Guide For Practitioners*. Australia: Departemen Of Linguistich, Macquarie University.
- Gatara, A. S. & Sofihian, S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Bandung: Fokus Media.
- Gregory, S. C. H. (2013). "The Importance Of action Research In teacher Education Program". Journal

- Issues In Educational Research. (online) tersedia. www.iier.org.au. (31 Maret 2016).
- Komalasari, K. (2010). *Pembelajaran Kontekstual*. Bandung: Refika Aditama.
- Purwanto. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suprihatiningrum, J. (2014). *Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan kompetensi Guru*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Thobroni, M. & Mustofa, A. (2011). *Belajar dan Pembelajaran*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuldafrial. (2010). *Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Media Perkasa.